

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, setiap wilayah harus mampu menjalankan roda organisasi secara benar, transparan dan bertanggung jawab yang tujuannya akan mengarah pada tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 1999, digunakan sebagai dasar untuk serangkaian reformasi kelembagaan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel (Prihatiningsih 2022).

Sektor publik sering dipandang sebagai sarang pemborosan, inefisiensi, sumber uang yang hilang, dan instansi yang merugi. Munculnya tuntutan tersebut menyebabkan organisasi sektor publik lebih fokus pada *value for money*, yang digunakan sebagai bentuk pengawasan lembaga keuangan terhadap publik. Penggunaan prinsip *value for money* dapat digunakan untuk meningkatkan anggaran sektor publik. Dengan konsep ini, dapat diperoleh memperoleh informasi apakah dana telah dibelanjakan sesuai indikator yang ditentukan (Prihatiningsih 2022).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bagian dari kewajiban mempertanggungjawabkan tata kelola organisasi, baik itu dalam konteks keberhasilan organisasi maupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan misi lembaga dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mardiasmo (2018) juga menjelaskan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Semua lembaga atau organisasi publik, mengharuskan lembaga pemerintahan melaksanakan kewajiban berupa akuntabilitas publik, tidak terkecuali Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki

sistem pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, rendahnya penerapan dimensi *value for money* menyebabkan tingkat akuntabilitas pemerintah menurun dan meningkatkan risiko berinvestasi serta mengurangi kemampuan berkompetisi dengan organisasi sektor publik lainnya yang sejenis (Abdullah, Akuntansi, and Ekonomi 2018).

Value for Money dibagi menjadi dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Dimensi ekonomis dan efisiensi bertujuan untuk menentukan : (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, dan peralatan kantor) secara hemat (ekonomis) dan efisiensi, (2) penyebab ketidakhematan dan ketidakefisienan, dan (3) apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi. Dimensi efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil program, efektivitas pelaksanaan program, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dalam penerapannya *value for money* memiliki tujuan utama (Mulyadi, 2002 dalam Prihatiningsih, 2022).

Renyowijoyo (2019) menjelaskan untuk melihat pelaksanaan *Value for Money* untuk meningkatkan akuntabilitas publik dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja berdasarkan bobot persentase sasaran/target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi sektor publik selama tahun berjalan dimana jika capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja lebih rendah dari capaian bobot persentase sasaran/target indikator kinerja berarti pelaksanaan *value for money* nya masih rendah, begitupun sebaliknya. Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang dimasa kepemimpinan kepala desa Dasman terus bergulir. Hasrul selaku Dirjen Wilayah lima yang dihubungi via WhatsApp beberapa waktu yang lalu ketika diminta tanggapann

ya mendorong permasalahan penyimpangan dana desa Budi Lestari dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Sementara Inspektorat Daerah Lampung Selatan ketika dimintai tanggapan, Kepala Inspektorat Anton Carmana melalui Haerul Anwar selaku Irbn V (pemeriksa) ikut mendorong agar supaya permasalahan penyimpangan Dana Desa Budi Lestari diteruskan ke APH.

Sementara diketahui sesuai data yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat MAJAS (Maju Adil Jagat Aman Sentosa) dan telah diberitakan dipuluhan media online sebelumnya bahwa selama Dasman menjabat Kepala Desa Budi Lestari diduga tidak membayar PPN PPH DD selama tiga tahun sejak TA 2018, 2019, dan 2020 yang mencapai nilai lebih dari 200 juta, lalu Dasman diduga juga tidak membayarkan Penghasilan Tetap (siltap) 14 Kepala Dusun selama satu bulan t/a 2020 senilai Rp. 30.800.000,- dan siltap 48 RT selama satu bulan t/a 2020 senilai Rp. 24.000.000,-. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka berbagai penelitian mengenai penerapan dimensi *value for money* telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerapan dimensi *value for money* untuk terwujudnya proses akuntabilitas publik.

(Sumber : Beritatrends.co.id, 2022).

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Prihatiningsih 2022) dengan judul Pengaruh *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Pada penelitian ini membuktikan bahwa *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Yang membedakan penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan pada Desa-Desa di Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh *Value for Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Desa-Desa Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh *Value for Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Desa-Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ekonomis berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
2. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
3. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ekonomis terhadap akuntabilitas publik.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh efisiensi terhadap akuntabilitas publik.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas publik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya untuk akuntabilitas kinerja sektor pemerintahan dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait *value for money* dalam hubungannya dengan akuntabilitas publik pemerintah daerah. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang *value for money* pada akuntabilitas publik pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang “pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik”

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan *value for money* terhadap akuntabilitas publik.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, definisi operasional, variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis mengenai pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

Bab V : Simpulan dan Saran

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**